

# Semua Demi Pembangunan: Ketika Birokrat Berbicara tentang dan untuk Pembangunan

*Semiarto A. Purwanto,  
Ezra M. Choesin dan  
Yunita T. Winarto  
(Universitas Indonesia)*

## Pendahuluan<sup>1</sup>

Pembangunan yang dilakukan selama masa pemerintahan Orde Baru telah lama dikenal dan dikritik sebagai pembangunan yang bersifat *top-down*. Segala perencanaan dilakukan oleh pusat berdasarkan indikator-indikator yang juga ditentukan oleh pusat, dan dalam pelaksanaan program-program ini penekanan seringkali adalah pada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Ketidaksesuaian antara apa yang telah digariskan dari atas dengan tuntutan dan kondisi nyata dalam masyarakat seringkali berarti bahwa sasaran program tidak akan tercapai. Dalam situasi seperti ini, para birokrat yang mendapat perintah dari atas sebagai pelaksana program melakukan

berbagai upaya agar sasaran tersebut tercapai—atau paling tidak terlihat demikian. Banyak kejadian dimana upaya yang mereka lakukan mencakup berbohong dan mengintimidasi—menjanjikan berbagai imbalan kepada anggota masyarakat yang bersedia mengikuti sebuah program yang telah dicanangkan, atau memaksa penduduk untuk mengikuti program tersebut disertai berbagai ancaman bila menolak. Ini terjadi terutama saat mereka menghadapi tentangan dari masyarakat setempat.

Bohong yang dilakukan oleh anggota-anggota birokrasi yang seharusnya memberi pelayanan pada masyarakat sudah tidak asing lagi bagi mereka yang pernah mengurus KTP, SIM, IMB atau surat-surat lain di instansi pemerintah. Adanya 'biaya administrasi' atau pungutan-pungutan lainnya dimana pelayanan yang diberikan sesungguhnya bebas biaya adalah contoh yang banyak ditemui. Begitu seringnya hal seperti ini terjadi, sehingga banyak orang menjadi heran bila mendapat pelayanan yang cepat dan gratis dari seorang birokrat. Seolah-olah berbohong itulah kondisi yang lazim, sementara pelayanan yang baik merupakan suatu penyimpangan.

Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Secara sederhana 'berbohong' adalah mengatakan sesuatu yang tidak benar. Di dalam banyak konteks pembicaraan, mengatakan sesuatu yang tidak benar merupakan tindakan yang dapat diterima oleh orang-orang di sekitar, misalnya dalam menyampaikan lelucon atau mendongeng kepada seorang anak. Akan tetapi dalam konteks penyampaian informasi atau jasa pelayanan umum yang melibatkan para birokrat, tindakan seperti ini seharusnya tidak dilakukan. Sebaliknya justru terdapat berbagai kasus berbohong dimana pelakunya tampak memberikan informasi yang tidak benar dengan begitu mudahnya, sekali pun kepada orang yang ia ketahui akan kebohongan tersebut. Berbohong menjadi suatu tindakan yang begitu mudah dan begitu sering dilakukan, tanpa ada rasa takut terhadap sanksi yang bisa muncul dari masyarakat sekitar.

Dalam tulisan ini, para penulis mencoba memperlihatkan bagaimana hal ini bisa terjadi. Berangkat dari pemikiran bahwa berbohong adalah perilaku yang dipelajari, maka, sebagaimana perilaku lain yang diperoleh melalui belajar, berbohong melibatkan proses-proses kognitif dalam diri individu, baik pelaku maupun individu-individu yang mendengarnya. Dalam individu terbentuk skema-skema interpretasi yang memungkinkannya memberi arti pada apa yang sedang terjadi: apakah seseorang telah berbohong atau dibohongi, apakah berbohong dapat dibenarkan dalam situasi yang sedang dihadapi, atau tindakan apa yang harus diambil bila berhadapan dengan orang yang berbohong. Sekali pun dari sudut pandang seperti ini berbohong menyangkut proses-proses mental individu yang bersifat internal, proses belajar berbohong tetap merupakan sebuah proses sosial yang terwujud sebagai tindakan dalam interaksi sosial. Dalam

<sup>1</sup> Tulisan ini adalah revisi dari makalah yang dipersiapkan untuk Panel 'Mendefinisi Ulang Kebudayaan Birokrat dan Militer' pada Simposium Internasional Jurnal ANTROPOLOGI INDONESIA 'Mengawali Abad 21: Menyongsong Otonomi Daerah, Mengenal Budaya Lokal, Membangun Integrasi Bangsa', Kampus Universitas Hasanuddin, Makassar, 1-4 Agustus 2000.

kasus-kasus dimana berbohong tampak begitu lazim terjadi di antara sejumlah besar orang, maka tindakan tersebut tidak bisa dilihat sekadar sebagai tindakan individual yang ditelusuri ke faktor-faktor yang bersifat idiosinkratik seperti motivasi atau pencapaian tujuan, melainkan sebagai sebuah gejala sosial budaya yang menyangkut orang yang berbohong, orang yang dibohongi, maupun orang-orang lain yang tahu akan kebohongan tersebut.

Tulisan ini akan berlanjut dengan uraian tentang kerangka pemikiran yang dipergunakan penulis untuk memahami masalah 'bohong' ini, diikuti dengan beberapa kasus kebohongan. Bentuk dan lingkup kebohongan berikut berbeda-beda. Pada awalnya akan dibahas kasus tentang kebohongan yang dilakukan oleh petugas-petugas yang bekerja dalam pelaksanaan SLPHT di Jawa Barat dan Lampung, dimana tindakan berbohong dilakukan sepihak terhadap petani-petani yang terkadang sadar bahwa mereka dibohongi. Kasus selanjutnya di PMDH agak berlainan. Di sini ditemukan keadaan dimana masing-masing pihak yang terlibat melakukan kebohongan, dan tampaknya sudah ada aturan baru yang terbentuk: 'tahu sama tahu'. Sementara itu, bagaimana dengan kondisi sekarang, setelah terjadi gerakan reformasi dan semakin terkuaknya berbagai kebohongan yang dilakukan pemerintah? Kondisi berbalik, dimana para pihak yang tadinya terlibat sebagai mereka yang dibohongi, kini berada dalam posisi yang lebih kuat untuk melakukan hal yang sama.

Data yang disajikan dalam tulisan ini diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Yunita T. Winarto bersama tim penelitiannya di Jawa Barat dan Lampung, dan dari penelitian Semiarto A. Purwanto di beberapa lokasi PMDH. Fokus kedua penelitian tersebut bukan pada masalah berbohong, namun ternyata data mengenai tindakan-tindakan berbohong terhimpun begitu banyaknya sehingga sulit untuk diabaikan begitu saja. Oleh karena ini pula, tulisan berikut lebih dimaksudkan sebagai sebuah studi awal tentang masalah berbohong di kalangan birokrat, dan bukan sebagai sebuah penjelasan yang komprehensif.

Istilah berbohong mempunyai pengertian yang lebih rumit daripada apa yang bisa dibaca dalam sebuah kamus. Telah disinggung di bagian awal bahwa 'mengatakan yang tidak benar' tidak disebut berbohong apabila ketidakbenaran tersebut diungkapkan dalam konteks ujaran tertentu. Eve Sweetser (1987) melakukan kajian terhadap kata *lie* atau bohong untuk melihat arti sesungguhnya dari kata tersebut. Ia berpendapat bahwa arti 'bohong' dan 'berbohong' tidak dapat dipahami tanpa melihat pada asumsi-asumsi yang lebih mendasar yang memberi konteks pada istilah 'bohong' tersebut. 'Bohong' hanya terjadi dalam dunia dimana orang cenderung mengikuti aturan-aturan yang ada, dimana pengetahuan adalah bermanfaat, dan dimana setiap ujaran adalah untuk menyampaikan informasi. Di luar setting ini, tidak ada yang bisa dikatakan 'bohong'. 'Dunia' yang dimaksud di sini bukanlah dunia nyata, melainkan gambaran

yang telah disederhanakan yang dimiliki individu tentang kehidupan sosial (*simplified worlds*). Walaupun Sweetser berbicara tentang masyarakat pengguna bahasa Inggris di Amerika Serikat, pemikirannya mengenai *simplified worlds* menjadi titik awal yang baik untuk memahami bagaimana para birokrat berbohong. Suatu ujaran yang diartikan sebagai bohong tidak lagi dianggap demikian apabila konteksnya berubah. Dengan kata lain, *simplified world* yang mendasari penggunaan ujaran tersebut bukan lagi dunia dimana ujaran adalah untuk menyampaikan informasi.

Masalahnya tidak sesederhana ini. Apa yang mendorong birokrat untuk menempatkan kata-kata tertentu dalam konteks atau *simplified world* yang berbeda, sehingga dalam kurun waktu lebih dari 30 tahun masa pemerintahan Orde Baru, berbohong menjadi bagian signifikan dari praktek-praktek birokrasi? Jawaban singkatnya adalah bahwa mereka *belajar* berbuat demikian. Proses belajar ini bisa dijelaskan dengan mengikuti pemikiran yang dikembangkan oleh Claudia Strauss dan Naomi Quinn (1997). Strauss dan Quinn telah mengembangkan sebuah teori tentang makna yang didasarkan pada pendekatan *connectionism*, yang akhir-akhir ini banyak dipakai dalam antropologi kognitif.<sup>2</sup> Teori yang mereka ajukan menempatkan makna pada diri individu, dan didefinisikan sebagai 'interpretasi yang muncul dalam diri seseorang ketika berhadapan dengan suatu obyek atau peristiwa pada suatu saat tertentu' (1997: 6). Makna adalah hasil dari skema-skema atau struktur-struktur kognitif yang terbentuk ketika individu menerima rangsangan dari luar, rangsangan mana dapat dilihat sebagai struktur-struktur ekstrapersonal, atau hal-hal yang terjadi di luar diri individu yang cenderung memperlihatkan keteraturan.

Adanya interaksi antara struktur-struktur intrapersonal dan ekstrapersonal inilah yang penting untuk diingat. Skema-skema interpretasi yang terbentuk merupakan pengombinasian dari unsur-unsur kognitif yang menjadi aktif ketika individu menerima rangsangan. Dalam sebuah model *connectionist*, semua rangsangan diproses secara bersamaan (*parallel distributed processing*); sehingga apabila ada rangsangan tertentu yang tidak diterima individu, rangsangan-rangsangan lainnya akan tetap diproses untuk menghasilkan sebuah skema interpretasi. Ini berarti bahwa skema yang dihasilkan menjadi beda: ada unsur kognitif yang tidak aktif karena tidak ada rangsangan, sehingga unsur tersebut tidak menjadi bagian dari skema bersangkutan. Model ini menjelaskan bagaimana individu dapat tetap memberikan interpretasi terhadap suatu gejala sekali pun ia

<sup>2</sup> Dalam tulisan ini, penulis hanya akan memberikan gambaran singkat tentang pendekatan *connectionism*. Pembaca yang ingin mendapat gambaran yang lebih lengkap dapat melihat bab III dari buku Strauss dan Quinn (1997). D'Andrade (1986) juga memberikan gambaran yang ringkas tentang penggunaan teori skema dan *connectionism* dalam antropologi psikologi. Sementara itu, pembaca yang lebih tertarik pada masalah-masalah yang lebih teknis dapat mengacu pada tulisan-tulisan dari bidang *cognitive science* dan filsafat, antara lain Churchland (1989).

tidak memiliki informasi yang lengkap, maupun menginterpretasi sebuah gejala yang disertai unsur-unsur (rangsangan-rangsangan) baru yang belum pernah ia temui sebelumnya.

Model dan teori yang dikembangkan Strauss dan Quinn diketengahkan di sini karena memberikan gambaran yang jelas tentang proses belajar. Pada dasarnya apa yang terjadi ketika seseorang belajar adalah penguatan kombinasi unsur-unsur kognitif tertentu. Semakin sering seseorang dihadapkan pada struktur-struktur ekstrapersonal tertentu, maka skema-skema tertentu menjadi semakin mantap. Sebaliknya, tindakan-tindakan yang berulang-ulang—yang didasarkan pada makna yang diberikan individu terhadap situasi yang dihadapi—menumbuhkan atau memperkuat struktur-struktur ekstrapersonal, sehingga terjadi umpan balik secara terus-menerus.<sup>3</sup> Sebuah konteks baru untuk berbicara kepada petani. Kasus bohong yang pertama ditampilkan di sini berasal dari kejadian-kejadian dalam pelaksanaan Program SLPHT. Program SLPHT adalah sebuah program nasional yang bertujuan mendidik petani dalam praktek pertanian yang akrab lingkungan. Dalam pelaksanaannya di tingkat desa, SLPHT diawali dengan pengenalan dan rekrutmen peserta yang dilakukan oleh petugas lapangan bersama dengan aparat desa mau pun petani. Adalah ciri dari banyak program yang berasal dari atas, yaitu bahwa para pelaksana mengikuti perspektif yang teknokratik dan menganggap bahwa masyarakat tidak tahu apa yang terbaik bagi diri mereka sendiri, sehingga mereka harus dibujuk atau diberi (uang) insentif untuk ikut dalam program.

Masalah insentif ini juga muncul dalam proses rekrutmen yang diamati oleh Winarto (1990) di Ciasem. Dalam janji yang dikemukakan oleh pelatih SLPHT, para petugas pertanian, petani yang direkrut sebagai peserta SLPHT itu akan memperoleh honorarium kehadiran sebesar Rp. 1.000,- setiap kali hadir. Dengan demikian, untuk 10 kali kehadiran tiap petani bisa diperkirakan akan menerima 10 x Rp. 1.000,- atau Rp. 10.000,-. Tetapi, tidak seluruh jumlah itulah yang diterima petani. Sekali dikatakan bahwa uang belum dapat dikeluarkan. Kali yang lain, pelatih mengusulkan agar honorarium petani untuk beberapa minggu, disisihkan untuk pembuatan kaos yang akan menjadi milik tiap-tiap peserta. Namun, hingga akhir acara, kaos tidak diterima oleh petani, sang pelatih tidak juga muncul, dan uang pun lenyap. Petani tahu bahwa uang yang seharusnya mereka terima, tetapi yang atas anjuran

pelatih kemudian mereka sepakati untuk diwujudkan dalam bentuk kaos, telah raib. Uang itu pastilah dimanfaatkan oleh sang pelatih. Implikasi lebih lanjut dari peristiwa yang membuat mereka kesal dan marah adalah penolakan petani atas program serupa pada masa selanjutnya. 'SLPHT tidak boleh masuk lagi ke desa kita,' itulah kesepakatan mereka. Para petani yang juga arif itu bahkan mengatakan bahwa mereka rela untuk tidak menerima uang sepeser pun dari pelatihan itu, karena melalui keikutsertaan dalam pelatihan itulah mereka dapat menimba ilmu. Lebih baik sejujurnya disampaikan oleh para pelatih bahwa tidak ada honorarium atau kompensasi yang akan mereka terima dari pelatihan itu, daripada 'dijanjikan akan ada honorarium, tetapi kemudian mereka dibohongi; dan uang yang menjadi hak mereka telah dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri'.

Apakah ini sebuah kasus berbohong, atau sekadar gambaran tentang seorang petugas birokrasi yang telah mengatakan yang sebenarnya, namun sungguh-sungguh mengalami kesulitan ketika mencoba menepati janji-janjinya? Tanpa adanya penjelasan yang lebih bisa diterima akal tentang kemana uang atau baju kaos tadi, maka kemungkinan terbesar adalah bahwa petugas tersebut—sebagaimana diperkirakan oleh para petani—telah berbohong. Kesimpulan ini diperkuat oleh kejadian lainnya yang menyangkut acara pembukaan SLPHT di Ciasem yang telah dimasukkan ke dalam program sebagai acara resmi yang dihadiri oleh para pejabat pemerintahan setempat. Untuk setiap lokasi unit pelatihan, pengelola program telah mengalokasikan dana untuk pelaksanaan acara pembukaan ini sebesar Rp. 50.000,- (tahun 1990). Dengan dilaksanakannya empat unit SLPHT untuk setiap kecamatan di bawah pengawasan Balai Penyuluhan Pertanian tingkat kecamatan (sesuai dengan struktur organisasi penyuluhan tahun itu), maka telah dialokasikan dana sebesar 4 x Rp. 50.000,- atau Rp. 200.000,-. Demikian pula alokasi dana yang diperuntukkan pelaksanaan acara penutupan SLPHT secara resmi, dimana digelar pameran hasil karya para petani, dan yang dihadiri pula oleh pejabat pemerintahan setempat. Dengan alasan menghindari 'kelelahan' dan 'waktu' yang harus diluangkan oleh Bapak Camat guna menghadiri keempat acara pembukaan dan juga keempat acara penutupan, digabungkanlah pelaksanaan pembukaan itu di satu lokasi saja. Begitu pula dengan acara penutupan di satu lokasi yang lain. Karena petani tidak mengetahui berapakah jumlah dana yang dialokasikan untuk keperluan empat kali pembukaan dan penutupan itu, maka petani pun menerima saja jumlah uang yang diberikan pada mereka sebesar Rp. 50.000,- (dari total sebesar Rp. 200.000,-), sekalipun mereka terpaksa 'menutupi kekurangannya' sendiri.

Di sini ada bukti kuat bahwa para birokrat telah dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar kepada petani. Para petani tampaknya menempatkan kata-kata petugas SLPHT dalam konteks atau '*simplified world*' seperti yang digambarkan Sweetser (1987) di atas, dimana ujaran petugas-petugas tersebut adalah dalam rangka penyampaian

<sup>3</sup> Pembicaraan tentang makna kini berubah ke pembicaraan tentang tindakan. Ini bukan sembarang lompatan. Skema-skema interpretasi bukan saja memunculkan pemahaman, melainkan juga perasaan-perasaan tertentu. Kognisi tidak dapat dilihat lepas dari perasaan-perasaan dan motivasi untuk bertindak; dan ketika individu mulai menghubungkan-hubungkan berbagai rangsangan yang diterimanya, ia juga mulai menghubungkan-hubungkan rangsangan-rangsangan tersebut dengan perasaan-perasaan yang ia alami pada saat itu. Perasaan-perasaan ini dapat memberikan daya motivasi bagi sebuah skema, misalnya ketika individu bertindak mencari rangsangan yang telah memberikannya rasa senang, atau sebaliknya berusaha menghindari rangsangan tertentu (Strauss dan Quinn 1997: 84, 101-110).

informasi. 'Katakanlah sejujurnya pada petani, kami akan menerimanya; tetapi janganlah sekali-kali membohongi petani,' demikian ucapan petani sendiri. Mereka menambahkan bahwa mereka sebenarnya rela bila tidak menerima uang sepeser pun dari pelatihan tersebut, karena melalui SLPHT mereka bisa menimba ilmu (Winarto 2000). Sementara itu, para birokrat melihat ucapan dan ceritera-ceritera yang mereka sampaikan kepada petani dalam konteks perolehan keuntungan. Ternyata, ketika berkumpul di antara mereka sendiri, para birokrat berbicara tentang alokasi dana dan acara-acara pembukaan dan penutupan resmi ini sebagai 'kesempatan emas untuk perolehan uang yang tidak boleh dilewatkan begitu saja'. Hal ini diketahui karena percakapan mereka secara tidak sengaja terdengar oleh isteri Ketua Kelompok Tani yang sedang berada di ruang sebelah pada saat itu.

Bila individu harus berkata yang tidak benar, ia akan mudah melakukannya bila memang konteks pembicaraan yang ia pergunakan memperbolehkannya.<sup>4</sup> Jadi, dengan menempatkan ceritera-ceritera yang mereka rekayasa ke dalam konteks di mana 'berbohong' tidak lagi relevan, maka para birokrat telah mendapatkan cara untuk mengatakan yang tidak benar, tanpa beban yang biasanya terkait dengan berbohong. Kita telah mendapat gambaran tentang bagaimana berbohong terkait pada konteks ujaran yang dipergunakan. Namun, tujuan lain dari tulisan ini adalah menunjukkan bahwa semua ini terjadi melalui proses belajar di kalangan birokrat, yang didukung oleh berbagai kondisi ekstrapersonal. Menurut kerangka pemikiran Strauss dan Quinn, skema yang terbentuk dalam kognisi birokrat—yang memungkinkan mereka melihat suatu situasi sebagai sebuah 'kesempatan emas' dan memotivasi mereka untuk merekayasa cerita-cerita seperti di atas—bisa muncul sebagai hasil usaha pemecahan suatu masalah.<sup>5</sup> Masalah yang dihadapi oleh para birokrat di sini adalah bagaimana memperoleh keuntungan sebesar-besarnya mengingat kedudukan mereka sebagai pegawai negeri dengan gaji yang rendah. Ini adalah sebuah asumsi; namun kiranya sebuah asumsi yang bisa diterima, mengingat banyaknya pemberitaan dan keluhan masyarakat yang muncul di media massa tentang penyelewengan dan penggelapan uang yang dilakukan oleh pegawai negeri di Indonesia. Asumsi ini menjadi titik tolak untuk pembahasan berikutnya yang berfokus pada proses belajar selanjutnya,

dimana skema-skema interpretasi menjadi semakin mantap dalam diri individu.

Dalam model *connectionist* seperti yang dikemukakan oleh Strauss dan Quinn, *belajar* adalah aktifnya unsur-unsur kognitif dalam kombinasi tertentu akibat rangsangan yang diterima. Semakin sering rangsangan tertentu diterima, semakin sering kombinasi unsur-unsur kognitif tersebut menjadi aktif. Rangsangan tersebut tentunya adalah apa yang diamati oleh individu sehari-hari. Demikianlah, selama ada kejadian-kejadian yang berpola yang berfungsi sebagai rangsangan dalam lingkungan individu, maka terbentuklah skema-skema interpretasinya. Hubungan timbal-balik terjadi ketika individu-individu bertindak berdasarkan skema interpretasi mereka (karena tindakan tersebut bisa memecahkan masalah yang mereka hadapi), dan memantapkan struktur-struktur ekstrapersonal atau kejadian-kejadian berpola tadi.

Pierre Bourdieu (1990) telah mengemukakan bahwa sebagian besar dari pengetahuan kita diperoleh dari praktek-praktek keseharian yang diamati dan dialami langsung.<sup>6</sup> Sisi lain dari pernyataan ini adalah bahwa instruksi formal yang kita terima hanya menyumbang sedikit saja kepada apa yang kita ketahui. Jarang sekali kita mendengar tentang orang yang secara eksplisit diajarkan berbohong. Hal yang terjadi adalah ketika individu mencoba 'berbohong' dan mencapai tujuan yang diharapkan, maka pengetahuan tersebut akan semakin mantap atau terinternalisasi dalam benaknya—sejauh ada dukungan lingkungan terhadap tindakannya, atau sebaliknya tidak ada tentangan yang berarti terhadap tindakan tersebut.

Dukungan seperti ini memang ada—tentu saja tidak dalam bentuk aktif, melainkan dalam bentuk tidak adanya sangsi atau perlawanan terhadap mereka yang berbohong.<sup>7</sup> Di kala petani tidak mengetahui bahwa mereka dibohongi, tentu mereka tidak berpikir untuk memberi perlawanan. Namun, bagaimana dengan situasi di atas, dimana petani tahu bahwa mereka dibohongi? Kemungkinan adanya perlawanan ternyata diredam oleh ceritera-ceritera bohong lain yang mengarah ke intimidasi.

Seorang pelatih yang berasal dari petugas pertanian / (pengamat hama) setempat memberikan semacam 'ancaman' pada peserta SLPHT bahwa mereka yang pada peserta SLPHT bahwa mereka yang kehadirannya kurang dari 4 kali, tidak akan menerima honorarium kompensasi kehadiran. Di pihak lain, daftar hadir peserta telah dimintakan pada saat pertama kali pelatihan dilaksanakan melalui tanda tangan semua

<sup>4</sup> Mengatakan seseorang sedang sakit ketika orang tersebut sebenarnya tidak sakit boleh-boleh saja bila ini adalah bagian dari sebuah lelucon (walau pun mungkin lelucon yang tidak banyak mengundang tawa). Akan tetapi bila hal yang sama dikatakan sebagai bagian dari pemberitaan, tentu si pembicara akan banyak dicela.

<sup>5</sup> Di sini perlu diingat lagi bahwa dalam sebuah model *connectionist*, skema adalah pengombinasian unsur-unsur kognitif sebagai hasil dari kombinasi rangsangan tertentu. Dengan demikian, pemecahan suatu masalah melibatkan kombinasi-kombinasi baru, di mana salah satu di antaranya memberikan jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi dengan baik.

<sup>6</sup> Bourdieu memang menjadi salah satu sumber inspirasi bagi Strauss dan Quinn. Hanya saja, kedua penulis yang terakhir disebutkan menekankan pentingnya motivasi dalam pengamatan, sehingga tidak semua praktek sosial yang terjadi di sekeliling individu akan menjadi bagian dari pengetahuannya (lihat Strauss dan Quinn 1997: 46-47).

<sup>7</sup> Birokrat yang berbohong juga dihadapkan pada kemungkinan sanksi dari atasan mereka atau dari lembaga-lembaga penegak hukum, dan ini bisa menjadi masukan untuk pembentukan skema interpretasi mereka. Namun masalah ini berada di luar ruang lingkup tulisan ini.

peserta yang hadir, untuk 12 kali pertemuan. Berarti, tanda tangan peserta untuk kehadiran selama 12 minggu lengkap telah diperoleh. Penandatanganan itu diperlukan sebagai bukti untuk pencairan biaya pelaksanaan SLPHT selama satu musim tanam itu. Pertanyaannya: bila biaya telah dicairkan, tentu telah tersedia dana sebesar 25 orang x Rp. 1500 x 12 kali. Ke manakah dana yang tidak dibayarkan pada peserta yang jumlah kehadirannya dinilai amat kurang itu? Secara tersurat, maka 'ancaman' itu seakan merupakan 'sanksi untuk mendisiplin para peserta', dan untuk 'memotivasi' mereka agar kehadiran ditingkatkan. Tetapi, kenyataannya tidak ada sanksi semacam itu yang ditetapkan oleh para pengelola program ini, karena bentuk ancaman sedapat mungkin dihindari (Winarto dkk. 2000: 46-47, Lampiran 2).

Bila program telah dirancang demikian, berarti pelatih tadi telah berbohong—mengarang ceritera sendiri—tentang adanya sanksi tersebut.<sup>8</sup> Di sini kita kembali berbicara masalah 'kesempatan emas', atau pemanfaatan dana oleh petugas-petugas yang dipercayakan mengelola dana tersebut. Namun satu hal yang juga perlu diperhatikan adalah bagaimana bentuk hubungan antara petugas pertanian dengan petani sendiri.

Seperti halnya banyak program pembangunan yang bersifat *top-down*, SLPHT ditandai oleh hubungan antara birokrat (petugas dan pelatih) dan petani yang bersifat super-subordinat. Petugas datang untuk mengajarkan pengetahuan baru kepada petani, sementara petani dianggap tidak tahu apa-apa. Dalam situasi ini, petugas pertanianlah yang menjadi pihak yang lebih berkuasa dalam menentukan jalannya pelatihan. Banyak sekali kejadian dimana petugas/pelatih cenderung menunjukkan sikap 'menggurui' terhadap petani (lihat Winarto dkk. 2000 untuk berbagai kasus). Hubungan semacam ini mempersulit petani ketika mereka hendak mempertanyakan ucapan atau tindakan petugas.

Hubungan-hubungan sosial ini merupakan struktur ekstrapersonal seperti yang telah disebutkan di atas. Dengan kata lain, hubungan super-subordinat antara petugas dan petani menjadi praktek keseharian yang dialami kedua belah pihak dan berperan dalam membentuk skema-skema interpretasi mereka. Bagi birokrat, 'berbohong' menjadi semakin mudah: selain telah menempatkan kata-kata atau cerita-cerita mereka dalam konteks pemanfaatan 'kesempatan emas', para birokrat juga belajar memperkirakan bahwa tidak akan ada perlawanan dari petani yang 'tidak tahu apa-apa' tentang program atau seluk-beluk birokrasi yang melaksanakan program tersebut. Sekali pun ada kejadian-

kejadian dimana petani menyuarkan kekesalan mereka, umumnya hal ini tidak dilakukan langsung di hadapan birokrat itu sendiri. Dengan demikian, perlawanan tidak terpolo dalam kehidupan sosial—dan tidak mengumpan balik pada skema interpretasi yang semakin mantap.

Begitu mudah dan terbiasanya birokrat berbohong, sehingga tindakan tersebut tidak lagi dilihat sebagai penyimpangan dari norma, melainkan justru sebagai norma itu sendiri. Berbohong menjadi sesuatu yang dilakukan karena memang 'seharusnya' demikian. Begitu mantapnya skema-skema yang mendorong terwujudnya berbohong ini, sehingga para birokrat tidak segan-segan melibatkan petani dalam kebohongan tersebut. Berbohong dilakukan, sekali pun si pelaku tahu bahwa orang di sekitarnya tahu dibohongi. Berikut adalah penggambaran bagaimana hal ini terjadi.

Pada suatu hari di bulan September 1999, bertepatan dengan diadakannya Pertemuan Teknis Petani Pemandu yang kedua di Desa Sukoharjo, datang pihak Irjen melakukan pemeriksaan tentang penggunaan dana bagi penyelenggaraan SLPHT. Saya melihat suasana 'hiruk pikuk' petugas mengantarkan tamu dari Irjen tsb. dari satu tempat ke tempat lain. Akibatnya, acara Pertemuan Teknis Petani Pemandu menjadi tidak menarik, karena petugas yang berkewajiban memandu acara tengah disibukkan oleh kegiatan pemeriksaan dari Irjen tsb. Di tengah-tengah berlangsungnya acara, tiba-tiba petugas dipanggil ke dalam salah satu ruangan untuk ditanyai, sesudah itu kembali lagi. Demikian pula dengan petani-petani pemandu yang hadir di situ. Mereka yang terdiri dari para petani pemandu dari berbagai desa di Batanghari dipilih secara acak (random) untuk ditanyai satu persatu mengenai pelaksanaan SLPHT. Mereka yang terpilih lalu dipanggil memasuki ruangan. Pak Ahmad, pemandu dari Desa Balerejo juga terpilih untuk ditanyai. Bersama-sama dengan pemandu dari desa-desa lainnya, ia dipanggil masuk ke dalam ruangan tempat 'wawancara' (ataukah 'interogasi'?) dilakukan. Ruangan tersebut terletak di ujung bagian depan kelas tempat Pertemuan Teknis Petani Pemandu dilangsungkan. Dengan demikian, siapa saja yang dipanggil masuk ke dalam, akan terlihat oleh semua peserta yang hadir pada PTPP itu. Saya perhatikan, tidak lama kemudian Pak Ahmad berada di dalam ruangan sekitar 45 menit lamanya. Karena saat itu saya hanya hadir sebagai pengamat kegiatan PTPP, maka tidak banyak informasi yang dapat saya peroleh tentang apa saja yang ditanyakan pada para pemandu yang dipilih untuk menghadap Irjen.

Pada malam harinya, saya tanyakan pada Pak Ahmad apa yang terjadi di dalam ruangan tersebut siang harinya saat ia dipanggil ke dalam. Pak Ahmad mengisahkan bahwa sebelum dipanggil masuk ke dalam ruangan, ia sudah dibekali secarik kertas oleh Pak X (salah seorang UPK-PLII Batanghari). Secarik kertas itu berisi tulisan tentang daftar rincian jumlah uang SLPHT untuk honor peserta dan berbagai macam biaya yang diperlukan. Isi kertas itu harus dihapalkan terlebih dahulu oleh para pemandu, sehingga pada saat ditanya di dalam, mereka sudah tidak

<sup>8</sup> Seandainya sang pelatih tidak pernah mengatakan bahwa sanksi itu merupakan kebijakan program, apakah masih bisa dikatakan bahwa ia telah 'berbohong'? Bukankah ia telah mengatakan yang sebenarnya ketika ia menyampaikan kepada petani bahwa ada sanksi? Terbukti, petani pada akhirnya terkena sanksi tidak menerima uang. Bohong di sini harus dilihat dalam konteks peran birokrat sebagai pelaksana (sebuah *simplified world* yang memuat gambaran tentang bagaimana seharusnya peran seorang birokrat).

perlu lagi melihat pada kertas tersebut (semacam kertas 'contekan'?). Pak Ahmad menceritakan bahwa sayangnya, waktu menghafal yang diberikan petugas sangat sedikit, sehingga ia tidak sempat 'menghafalkannya dengan baik'. Untung teman-temannya yang dipanggil bersamaan masuk ruangan dengan Pak Ahmad, sudah cukup hafal dengan isi tulisan yang tertera di kertas tsb. Sebelum Pak Ahmad menjawab, sudah ada temannya yang terlebih dahulu menjawab. Dengan demikian, Pak Ahmad merasa terbantu dalam menjawab pertanyaan. Tetapi, diutarakannya, bahwa ia merasa 'sangat tidak enak harus berbohong', karena dalam kenyataannya ia tidak pernah menerima uang sebesar yang tertera di atas kertas tersebut. Malahan, ada pos-pos yang tidak diberikan pada petani (Winarto dkk. 2000: Lampiran 2).

Mengapa seorang petani seperti Pak Ahmad yang diceriterakan di atas mau berbohong? Ketika hal ini ditanyakan kepadanya, ia menjawab bahwa seandainya ia tidak mau, ia bisa dimusuhi (oleh siapa ia tidak menyebutkan), seraya menambahkan bahwa lain kali ia akan menolak agar terlepas dari paksaan berbohong. Para petani juga mempergunakan skema interpretasi mereka untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi; namun bila berbohong bisa membantu mereka agar tidak dimusuhi, mengapa skema ini tidak menjadi mantap?

Skema-skema yang kita miliki bukanlah bangunan sederhana. Kita bisa membentuk skema-skema kompleks yang terdiri dari sejumlah skema (D' Andrade 1986: 8). Selanjutnya, sebuah skema tidak hanya berfungsi untuk menjawab sebuah masalah saja. Ketika Pak Ahmad berbohong, misalnya, ia mempergunakan skema untuk berbicara yang sekaligus berfungsi mengarahkannya untuk mewujudkan penampilan tertentu sebagai orang yang tidak perlu dimusuhi (lihat Strauss dan Quinn 1997; Holland dan Quinn 1987: 7). Di sini kita harus memperhatikan bagaimana Strauss dan Quinn membuat pembedaan antara makna dan skema dalam model teoritik mereka. Makna adalah interpretasi yang diberikan terhadap situasi-situasi yang spesifik, sedangkan skema adalah kombinasi unsur-unsur kognitif yang memungkinkan munculnya interpretasi tersebut. Makna bersifat sesaat, sedangkan skema adalah struktur-struktur yang relatif stabil (1997) Bila kita kembali kepada contoh kejadian di atas, maka tampaknya Pak Ahmad telah menginterpretasi situasi yang ia hadapi sebagai sebuah situasi dimana ia harus memakai skema untuk berbohong.<sup>9</sup> Selama situasi-situasi seperti ini (yang mendorongnya berbohong) tidak banyak dijumpai, maka skema untuk berbohong tidak menjadi mantap dalam kognisinya. Skema tersebut tidak memiliki daya motivasi, karena masih terkait pada perasaan-perasaan bersalah, takut atau terpaksa.

Dengan banyaknya kejadian-kejadian seperti ini, mungkinkah di suatu saat petani menjadi terbiasa dan mudah berbohong seperti halnya para birokrat yang mereka hadapi? Dari apa yang kita ketahui tentang proses belajar dan

pembentukan skema-skema interpretasi dalam individu, beserta kondisi-kondisi di lapangan seperti tidak adanya sanksi terhadap mereka yang berbohong, atau kedudukan petani yang subordinat di hadapan birokrat, maka jawabannya—bagaimana pun memprihatinkan—adalah, ya.

Meski pun para petani yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan SLPHT tidak (belum?) memperlihatkan kecenderungan untuk berbohong, hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) merupakan sebuah program pembangunan pemerintah yang dijalankan oleh perusahaan pemegang HPH, namun dalam pelaksanaannya tidak sungguh-sungguh memperhatikan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasarannya.

Masalah PMDH berbeda dari masalah SLPHT, karena dalam program pembinaan masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi hutan ini birokrat tidak langsung berhadapan dengan masyarakat desa. Di sini mereka berhadapan dengan perusahaan pemegang HPH yang mempunyai kedudukan yang cukup kuat dalam hubungan birokrasi pemerintah-perusahaan yang terjadi. Artinya, pola hubungan super-subordinat (seperti terlihat antara petugas SLPHT dan petani) yang membentuk struktur-struktur ekstrapersonal tidak didapatkan di sini.<sup>10</sup> Bila demikian, apa yang mengumpan balik pada skema-skema para birokrat, sehingga memungkinkan mereka untuk terus berbohong? Salah satu hal yang mengumpan balik adalah perilaku orang-orang perusahaan yang mereka hadapi. Dalam upayanya memaksimalkan keuntungan, perusahaan<sup>11</sup> berusaha mengeluarkan anggaran sesedikit mungkin, sekadar untuk memenuhi syarat-syarat program yang telah ditetapkan pemerintah. Rencana program yang lebih disesuaikan dengan petunjuk pelaksanaan daripada kebutuhan masyarakat, anggaran fiktif, dan laporan-laporan yang disesuaikan dengan rencana program (dan bukan disusun berdasarkan kondisi-kondisi nyata di lapangan) menjadi hal-hal yang biasa bagi perusahaan. Di lain pihak, aparat pemerintah, mulai dari petugas Dinas dan Kanwil Kehutanan yang menjadi pengatur pelaksana program, justru lebih banyak mengharap perusahaan untuk mengikuti saja pola yang telah tergariskan, menutup diri terhadap kesalahan yang dibuat perusahaan,

<sup>9</sup> Skema apa yang ia gunakan untuk menginterpretasi situasi tersebut? Bila dilihat dari penjelasannya tentang mengapa ia berbohong, bisa diperkirakan bahwa ini adalah skema-skema tentang petugas, pejabat (Irjen), hubungan antara petugas dan pejabat mau pun dirinya sendiri.

<sup>10</sup> Ini adalah suatu penyederhanaan. Sudah barang tentu hubungan-hubungan kekuasaan terjadi dalam konteks-konteks yang spesifik; tetapi jelas bahwa posisi perusahaan HPH di hadapan birokrat adalah berbeda dari posisi petani.

<sup>11</sup> Untuk singkatnya, istilah *perusahaan* di sini dipakai untuk mengacu pada orang-orang yang bekerja pada perusahaan tersebut; dan tidak berarti bahwa 'berbohong' menjadi kebijakan dari badan usaha itu sendiri.

dan berusaha mempermainkan peraturan untuk mencari kesalahan perusahaan.

Pada bagian ini, bukan maksud penulis untuk menggambarkan kembali berbagai kejadian berbohong, melainkan untuk mengetengahkan kasus dimana dua pihak yang berhubungan saling membohongi; dan masing-masing tahu bahwa mereka saling membohongi. Komunikasi—dalam bentuk laporan-laporan pelaksanaan program mau pun ancaman pencabutan izin program—sudah tidak lagi dilakukan dalam *simplified world* dimana tindakan tersebut adalah untuk menyampaikan informasi yang benar.

Akan tetapi, dalam program PMDH masih ada pihak ketiga yang perlu diperhatikan, yaitu masyarakat desa yang menjadi sasaran program. Dengan semakin sulitnya kehidupan mereka di saat perusahaan HPH mengeruk keuntungan dari sumber daya alam yang ada, maka penduduk desa berupaya untuk mendapatkan keuntungan dari program PMDH. Ini mereka lakukan dengan merekayasa ceritera-ceritera tentang aturan adat, batas penguasaan wilayah dan klaim kepemilikan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, untuk menjadi argumen untuk menuntut ganti rugi.

Pada saat kebohongan menjadi suatu hal yang biasa dan dilakukan oleh—dan pada—satu komunitas yang menerima kebohongan itu sebagai sesuatu yang ‘memang seharusnya tidak terjadi, tapi toh kita harus mengalaminya’, maka kita akan berhadapan dengan kebohongan struktural. Kebohongan struktural di sini adalah suatu kondisi dimana perilaku ‘tahu sama tahu’ atas segala yang menyimpang dari norma tetapi tetap dilakukan, telah menjadi modus perilaku. Dengan demikian, penyimpangan dari norma tadi menjadi sesuatu yang dianggap normal. Berbohong dilakukan karena begitulah seharusnya—paling tidak dalam konteks pelaksanaan program PMDH.

Apakah perilaku berbohong akan meluas ke bidang-bidang kehidupan lain, selain dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan? Akal sehat mengatakan tidak, karena pada tingkat tertentu manusia membutuhkan informasi yang benar untuk bertahan hidup. Namun tidaklah tertutup kemungkinan bahwa dalam ruang lingkup atau konteks tertentu, berbohong menjadi hegemonik. Berbohong menjadi praktek yang tidak dipertanyakan lagi karena begitu kuatnya tertanam dalam diri individu.<sup>12</sup> Bagi mereka yang baru mulai berbohong, pengamatan terhadap bagaimana orang lain berbohong, serta pengamatan atas hasil yang bisa dicapai dari berbohong sendiri merupakan hal penting. Dalam proses belajar bagaimana berbohong, bahasa memainkan peran penting. Sebuah ancaman disampaikan sebagai ‘ada sanksi’

atau ‘aturan’; klaim atas tanah diselubungi dengan kata-kata ‘hak ulayat’ dan lain sebagainya. Pendek kata, berbohong menuntut adanya kosa kata tertentu yang memungkinkan pelaku lebih mudah berbohong.

Carol Cohn (1987) telah memperlihatkan bagaimana penggunaan istilah-istilah tertentu mempermudah seseorang untuk berbicara tentang suatu masalah, tanpa banyak berpikir tentang implikasi masalah yang ia bicarakan.<sup>13</sup> Adalah perkiraan penulis bahwa jargon pembangunan mempunyai efek yang serupa dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Dalam kasus SLPHT, misalnya, konsep *ekologi* atau *siklus kehidupan* dibahas begitu mendalamnya, sehingga para birokrat melupakan aspek penting dari program, yaitu nasib petani itu sendiri.

Sebagai contoh, paket kredit untuk petani mensyaratkan petani untuk mengambil komponen pestisida, padahal para petani SLPHT mengikuti pelatihan agar mereka dapat mempraktekkan pengendalian hama terpadu tanpa pestisida. Ketika petani menolak mengambil komponen pestisida ini, maka jawaban yang mereka peroleh adalah bahwa pestisida tetap perlu untuk ‘jaga-jaga’. Namun alasan ini ditambahkan oleh para birokrat, yang mengatakan bahwa ‘reformasi harus dilaksanakan secara terkendali’. Maksud mereka adalah bahwa kendati pun komponen pestisida itu tetap harus diambil, kini petani mendapatkan ‘kebebasan’ untuk memilih sendiri pestisida yang mereka butuhkan. Dengan menggunakan istilah ‘reformasi’, seolah-olah birokrat tidak melihat kesalahan mereka dalam berbohong karena ‘pada pokoknya sudah ada yang berubah’.

## Penutup

Dalam tulisan ini para penulis telah mencoba memberi gambaran tentang meluasnya praktek berbohong di kalangan petugas birokrasi yang terlibat dalam program-program pembangunan di Indonesia. Sebuah model *connectionist* yang didukung oleh teori-teori pembelajaran lainnya dipakai untuk melihat bagaimana berbohong terjadi karena kata-kata yang disampaikan dimasukkan ke dalam konteks atau *sim-*

---

diberikan oleh Comaroff dan Comaroff mau pun Bourdieu (dalam Strauss dan Quinn 1997) bahwa ada hal-hal yang tidak dipertanyakan karena *tidak bisa* dipertanyakan atau diungkapkan, sebab berada di luar kesadaran individu. Strauss dan Quinn tidak sependapat bahwa sesuatu yang dipelajari secara tidak sadar akan terus berada di luar kesadaran individu (1997: 46-47). Istilah hegemoni dipakai di sini untuk menekankan adanya praktek-praktek yang tidak dipertanyakan lagi, atau yang dianggap lazimnya.

<sup>13</sup> Cohn menggambarkan bagaimana kalangan militer di Departemen Pertahanan Amerika Serikat berbicara tentang senjata dan strategi perang nuklir dengan istilah-istilah seperti *clean bomb* atau *collateral damage*. Penggunaan kata-kata ini secara berulang memantapkan citra senjata nuklir sebagai senjata yang bersih (karena tingkat radiasinya rendah) atau melatih orang mengukur tingkat kerusakan dari segi seberapa banyak senjata musuh yang bisa mereka hancurkan, sehingga mereka lupa substansi pembicaraan mereka, yaitu pemusnahan ribuan atau bahkan jutaan jiwa manusia (1987: 17-18).

<sup>12</sup> John dan Jean Comaroff (yang juga menjadi acuan Strauss dan Quinn dalam menyusun kerangka teoritik mereka) mengartikan hegemoni sebagai ‘... *that order of signs and practices, relations and distinctions, images and epistemologies—drawn from a historically situated cultural field—that come to be taken-for-granted as the natural and received shape of the world and everything that inhabits it*’ (1991: 23) Strauss dan Quinn tidak menggunakan istilah ini karena mengandung pengertian yang

*plified world* yang berbeda. Hal lain yang digambarkan adalah bagaimana berbohong ini dipelajari oleh individu dan bertahan sebagai sebuah praktek sebagai akibat interaksi antara skema-skema interpretasi individu dan berbagai struktur ekstrapersonal. Berbohong akhirnya menjadi hegemonik—dilakukan karena dianggap sebagai praktek yang ‘seharusnya’ diwujudkan. Selanjutnya, berbohong dipermudah dengan penggunaan kosa kata tertentu. Kata-kata yang masih sangat terbuka untuk dimaknai secara berbeda oleh pembohong dan pendengarnya akhirnya bisa membantu pembohong untuk memberi pembenaran atas kata atau ceritera bohongnya.

Namun demikian, sebagai penutup perlu disampaikan beberapa catatan akhir. Pembahasan mengenai berbohong menyangkut masalah pendefinisian. Definisi ‘bohong’ yang ada pada birokrat bisa ditelusuri dari *simplified world* yang mereka bangun untuk dijadikan konteks kata-kata atau ceritera-ceritera mereka. Akan tetapi, adalah hal yang lebih sulit untuk mengetahui secara pasti apakah seseorang telah berbohong. Dalam kasus-kasus di atas, tidak ada yang mengaku telah berbohong; melainkan ada pihak lain yang menuduh ( *baca: mendefinisikan*) bahwa mereka telah berbohong. Oleh karena itu, definisi awal yang dipinjam dari Sweetser (1987) harus dikembangkan melalui penelitian yang lebih terfokus pada masalah berbohong.

Dari segi yang lebih praktis, banyak pihak yang berharap bahwa setelah berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru, maka kondisi birokrasi di Indonesia akan membaik. Harapan seperti ini bertumpu pada kenyataan bahwa semakin banyak pihak yang berani menyuarkan kekesalan mereka terhadap pelayanan birokrasi, bahkan hingga menuntut secara hukum. Akan tetapi, sebagaimana telah diuraikan dalam tulisan ini, gerakan-gerakan pembaharuan atau ‘reformasi’—sekali pun berpotensi mengubah struktur-struktur ekstrapersonal yang selama ini ada—juga berpotensi untuk memberikan cara-cara baru untuk berbohong. Adalah penting bagi semua untuk terus memperhatikan perkembangan ini.

## Kepustakaan

Bourdieu, P.

- 1993 ‘Structures, Habitus, Practices,’ dalam C. Lemert (ed.) *Social Theory: The Multicultural and Classical Readings*. Boulder: Westview Press. Hal. 479-484.

Churchland, P.M.

- 1989 *A Neurocomputational Perspective: The Nature of Mind and the Structure of Science*. Cambridge: MIT Press.

Cohn, C.

- 1987 ‘Slick ‘ems, Glick ‘ems, Christmas Trees, Cookie Cutters: Nuclear Language and How We Learned to Pat the bomb,’ dalam *Bulletin of the Atomic Scientists*. Juni 1987, hal. 17-24.

Comaroff, J. dan J. Comaroff

- 1991 ‘Introduction,’ dalam J. dan J. Comaroff, *Of Revelation and Revolution: Christianity, Colonialism and Consciousness in South Africa*, Vol 1. Chicago: Chicago University Press. Hal. 1-48.

D’Andrade, R.

- 1986 ‘Cognitive Anthropology,’ Makalah untuk ‘Psychological Anthropology: Appraisal and Prospectus’ dalam Rapat Tahunan AAA, Philadelphia. Holland, D. dan N. Quinn  
1987 ‘Culture and Cognition,’ dalam D. Holland dan N. Quinn (eds) *Cultural Models in Language and Thought*. Cambridge: Cambridge University Press. Hal. 3-42.

Strauss, C. dan N. Quinn

- 1997 *A Cognitive Theory of Cultural Meaning*. Cambridge: Cambridge University Press.

Sweetser, E.

- 1987 ‘The Definition of Lie: An Examination of the Folk Models Underlying a Semantic Prototype,’ dalam D. Holland dan N. Quinn (eds) *Cultural Models in Language and Thought*. Cambridge: Cambridge University Press. Hal. 43-66.

Winarto, Y.T., E.M. Choesin, Fadli, A.S.H. Ningsih dan S. Darmono

- 2000 Satu Dasa Warsa Pengendalian Hama Terpadu: Berjuang Menggapai Kemandirian dan Kesejahteraan, Laporan Penelitian. Jakarta: Indonesia FAO Inter Country Program.